

RI Hadapi Sengketa Dagang Nikel Dengan Uni Eropa

Tanggal : Sabtu , 16 Januari 2021

Media : Investor Daily

Halaman : 22

Wartawan : Sanya Dinda

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Valdis Dombrovskis (Wakil Presiden Eksekutif dan Komisaris Perdagangan UE)

Rubrik : Industries, Trade & Services

Topik : Nikel

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR DIGUGAT

RI Hadapi Sengketa Dagang Nikel dengan Uni Eropa

Oleh Sanya Dinda

▶ **JAKARTA** - Pemerintah akan menjalani proses sengketa dagang bijih nikel dan bijih besi dengan Uni Eropa (UE) sesuai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Dua komoditas itu merupakan bahan baku baja tahan karat (*stainless steel/SS*)

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, EU ingin mengeliminasi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan bijih besi Indonesia. Belum lama ini, perwakilan Indonesia di Jenewa, Swiss, mendapatkan notifikasi dari UE yang isinya meminta WTO membentuk panel untuk mengeliminasi larangan ekspor tersebut.

"Secara singkat, UE menganggap peraturan Indonesia tentang minerba (mineral dan batu bara) menyulitkan pemain baja SS setempat untuk kompetitif," kata Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/1).

Lutfi melanjutkan, pemerintah akan menyiapkan tim hukum terbaik untuk mempertahankan kebijakan tersebut. Dia kecewa, karena sengketa ini tidak kunjung selesai dalam tahap konsultasi kedua pihak. Alih-alih, otoritas UE memilih meminta WTO membentuk panel untuk mengeliminasi kebijakan ini.

"Dalam waktu dekat, kami pastikan tidak ada dampak langsung terhadap produsen dalam negeri. Kita akan terus berkompetisi, menciptakan nilai tambah, karena pada 2020 Indonesia mampu menghasilkan devisa US\$ 9,6 miliar dari besi dan baja, nomor tiga setelah minyak kelapa sawit dan batu bara. Ini bagian dari transformasi Indonesia dari penjual bahan mentah ke barang industri berteknologi tinggi," imbuh Lutfi.

Dengan transformasi perekonomian Indonesia tersebut, Lutfi memandang sengketa pertama ini tidak akan menjadi yang terakhir. Indonesia akan terus menghadapi banyak kendala, saat hendak menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di dalam negeri. Kemendag akan membuat tim untuk menyelesaikan sengketa ini dan kasus serupa di masa yang akan datang.

Selain terkait bahan baku SS, Ke-



Muhammad Lutfi

mendag sedang menggugat Arahan Energi Terbarukan II (RED II) milik UE terkait kelapa sawit atau sengketa nomor DS593. Meski dalam ranah yang berbeda, kedua sengketa tersebut ditujukan untuk membela kepentingan nasional UE.

Dalam sengketa terkait minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*), Lutfi menilai, hal itu dipicu langkah UE membela produk minyak nabati mereka. Padahal, produk itu inferior dari sisi efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dibandingkan CPO Indonesia.

Lutfi menjelaskan, pemerintah akan tetap mengundang perwakilan UE untuk berkomunikasi guna meningkatkan produktivitas SS dan minyak

nabati. Lutfi akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan rencana tersebut. Dia tidak segan untuk mengirimkan ahli terbaik dari dalam negeri guna meningkatkan produktivitas Uni Eropa.

"Seperti diketahui, Indonesia berhasil menjadi penghasil baja dan SS nomor dua dunia di belakang Tiongkok. Indonesia sukses menciptakan nilai tambah lewat industri berteknologi tinggi dengan energi efisien dan menghasilkan produk yang superior dibanding UE," kata dia.

Sebelumnya, UE meminta WTO membuat panel guna mengeliminasi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan bijih besi asal Indonesia. Kebijakan ini dinilai telah mengganggu produktivitas SS UE yang menyangkut 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung. Di samping itu, kebijakan pemerintah Indonesia ini dipandang tidak sesuai dengan Pasal XI:1 the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Wakil Presiden Eksekutif dan Komisaris Perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengatakan, pihaknya akan selalu bertindak untuk melindungi hak-hak operator dan menjaga tingkat persaingan bagi produsen di UE. "Faktanya, tidak ada anggota WTO yang diizinkan untuk membatasi ekspor bahan mentah dengan cara ini dan memberlakukan pembatasan ilegal untuk menguntungkan produsen dalam negeri," kata Valdis dalam siaran resmi, Kamis (14/1).